

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian. Pada bagian ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena permasalahan yang dialami hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan permasalahan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi ada hal lain juga yang berkaitan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Istilah kemiskinan sendiri muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Annur, 2013).

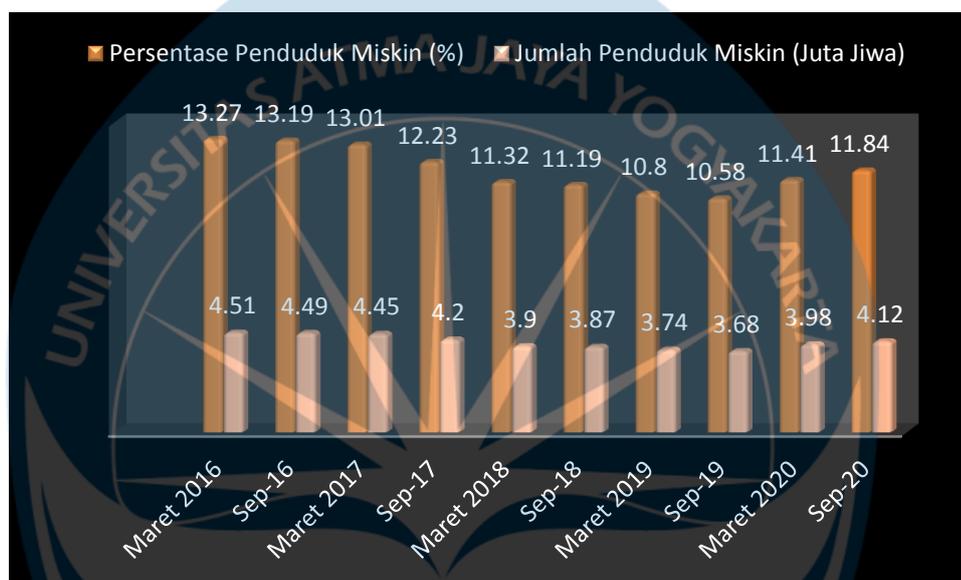
Laporan dari Bank Dunia (*World Bank*) adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Dengan kondisi di mana hampir 42% rumah tangga hidup diantara garis kemiskinan US\$1- dan US\$2 per hari, ini mengartikan bahwa terlalu banyak rakyat Indonesia

yang rentan jatuh ke kemiskinan (Nurwati, 2008). Menurut Mudrajad (2006:120) penyebab kemiskinan akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of proverty*) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan mengakibatkan rendahnya investasi. Apabila masalah ini terus dibiarkan tanpa ada pemutusan rantai kemiskinan maka siklus yang ada akan terus berputar. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai motor penggerak perekonomian suatu daerah (Puspita, 2015).

Namun, Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial. Proses pembangunan ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi kurang dalam hal sumber daya manusia, namun ada juga daerah yang kurang dalam hal sumber daya alam namun memiliki banyak sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah (Annur, 2013).

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dari beberapa provinsi di Indonesia yang tidak luput dari masalah kemiskinan. BPS mencatat

perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada periode 2016-2020 yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Secara umum, pada periode 2016-2020 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya kecuali pada Maret 2020 dan September 2020.



**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**di Jawa Tengah, Maret 2016 – September 2020.**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil ini menunjukkan pada September 2020 sebanyak 11,84 persen, naik dibanding September 2019 yang tercatat sebesar 10,58 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kemiskinan selama periode September 2019 – Maret 2020 antara lain karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk di mana mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Faktor lainnya yang mendorong terjadinya peningkatan kemiskinan karena adanya pertumbuhan

pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal 1 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Selanjutnya disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020. Kemudian faktor lainnya dikarenakan pada periode September 2019 – Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78%) dan daging ayam ras (5,53%), minyak goreng (7,06%), gula pasir (1,67%) dan telur ayam ras (11,10%). Lalu penyebab lainnya dikarenakan rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019 – Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67% namun peningkatan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Garis Kemiskinan (GK) yang sebesar 3,20%. Terakhir terjadi peningkatan yang diakibatkan oleh penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang (Susenas, Maret 2019). Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistika mempublikasi data pada tahun 2020 yang berisikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang akan ditunjukkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin serta Persentase Penduduk**  
**Miskin di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.**

No.	Nama kabupaten/kota	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Kab. Cilacap	1.944.857	198.6	11,46
2	Kab. Banyumas	1.776.918	225.8	13,26
3	Kab. Purbalingga	998.561	149.5	15,90
4	Kab. Banjarnegara	1.017.767	144.9	15,64
5	Kab. Kebumen	1.350.438	211.1	17,59
6	Kab. Purworejo	769.880	84.8	11,78
7	Kab. Wonosobo	879.124	137.6	17,36
8	Kab. Magelang	1.299.859	146.3	11,27
9	Kab. Boyolali	1.062.713	100.6	10,18
10	Kab. Klaten	1.260.506	151.8	12,89
11	Kab. Sukoharjo	907.587	68.9	7,68
12	Kab. Wonogiri	1.043.177	104.4	10,86
13	Kab. Karanganyar	931.963	91.7	10,28
14	Kab. Sragen	976.951	119.4	13,38
15	Kab. Grobogan	1.453.526	172.3	12,46
16	Kab. Blora	884.333	103.7	11,96
17	Kab. Rembang	645.333	100.1	15,60
18	Kab. Pati	1.324.188	127.4	10,08
19	Kab. Kudus	849.184	64.2	7,31
20	Kab. Jepara	1.184.947	91.1	7,17
21	Kab. Demak	1.203.956	146.9	12,54
22	Kab. Semarang	1.053.094	79.9	7,51
23	Kab. Temanggung	790.174	77.3	9,96
24	Kab. Kendal	1.018.505	97.5	9,99
25	Kab. Batang	801.718	70.6	9,13
26	Kab. Pekalongan	968.821	91.9	10,19
27	Kab. Pemasang	1.471.489	209	16,02
28	Kab. Tegal	1.596.996	117.5	8,14
29	Kab. Brebes	1.978.759	308.8	17,03
30	Kota Magelang	121.526	9.3	7,58
31	Kota Surakarta	522.364	47	9,03
32	Kota Salatiga	192.322	9.7	4,94
33	Kota Semarang	1.653.524	79.6	4,34
34	Kota Pekalongan	307.15	22.2	7,17
35	Kota Tegal	273.825	19.5	7,80

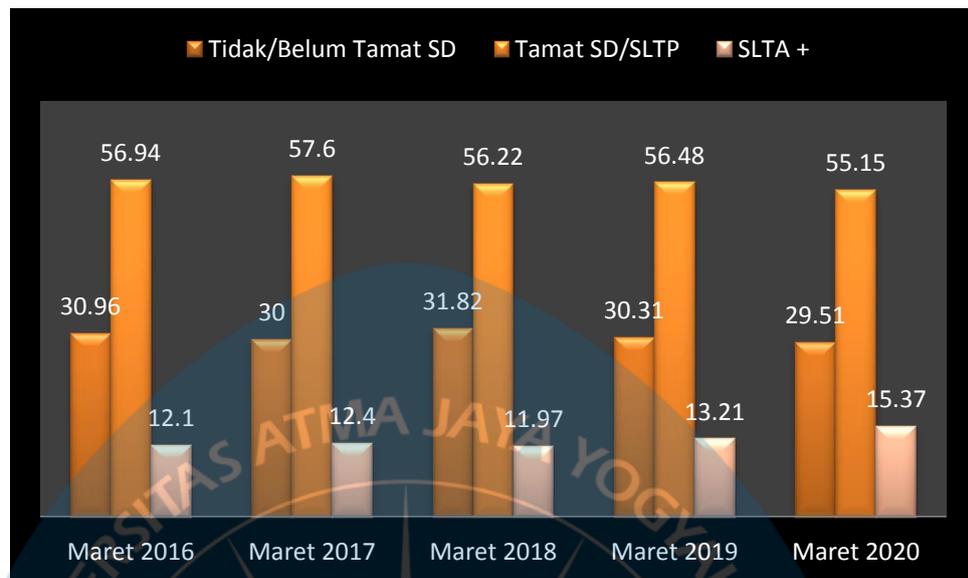
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Tercatat tingkat kemiskinan terendah ada pada Kota Semarang dan Kota Salatiga dengan jumlah 4,34 persen dan 4,94 persen. Sementara tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Brebes yang mencapai sebesar 17,59 persen, 17,36 persen dan 17,03 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi, melalui publikasi Analisis Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2020 BPS menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir berbagai program pengentasan kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen akan tetapi, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang terjadi masing kurang efektif, tidak komprehensif dan masih belum tepat sasaran. Mengacu dari hal tersebut yaitu tingginya persentase yang ditunjukkan oleh Kabupaten Kebumen yang diikuti oleh Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes dan dari dua kota yaitu Kota Semarang diikuti Kota Salatiga maka data yang akan digunakan dalam penelitian adalah dari kelima kabupaten/kota tersebut yang nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan antara lain tersedianya data yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya mampu menjadi instrumen tangguh bagi pengambilan kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang

miskin. Menggunakan data kemiskinan yang baik bisa digunakan untuk melakukan evaluasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan dari yang terendah dan yang tertinggi, serta menentukan target penurunan jumlah penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka.

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, menurut beberapa ahli bahwa penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yacoub, 2012). Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau PDRB perkapita pada masing-masing daerah (Kraay, 2006). Pendapatan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat di suatu wilayah bisa diukur dari pendapatan perkapita (Safitri dan Aliasuddin, 2016). Pendapatan perkapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada periode tertentu dengan menghitung pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut (Maulidah dan Soejoto, 2015). Menurut Jalles (2011) adanya peningkatan pendapatan agregat suatu wilayah dapat memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Sejalan dengan Simanjuntak (2001) bahwa semakin tinggi PDRB perkapita maka semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain penduduk miskin akan berkurang.

Aspek penting lainnya untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan antara lain dengan memperbaiki kondisi sumber daya yang berpotensi untuk menurunkan kemiskinan seperti sumber daya manusia melalui pendidikan. Memberikan pendidikan terhadap anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (*World Bank*). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan memiliki peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Data yang dikeluarkan BPS untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah pada 2016-2020, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas berpendidikan tamat SD/SLTP, yaitu sebesar 56,94% pada Maret 2016 dan 55,15% pada Maret 2020. Namun peningkatan pada mereka yang berpendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas sebesar 12,10% pada Maret 2016 menjadi 15,34% pada Maret 2020 yang akan ditunjukkan melalui Gambar 1.2.



**Gambar 1. 2**  
**Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2016- Maret 2020.**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Indikator lainnya yang dapat mendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan dengan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memadai. Pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan tingkat kesehatan yang baik maka masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan.

## 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh PDRB perkapita terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 2) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 3) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 4) Bagaimanakah pengaruh PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Bagi dunia keilmuan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan atau referensi dalam studi kedepannya yang berkaitan dengan riset ini dan juga sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang penelitian ini.

2) Bagi Pemerintah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya di Jawa Tengah.

3) Bagi Penulis

Sebagai karya tulis ilmiah yang merujuk pada hasil penelitian yang menjadi salah satu syarat wajib mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata-1.

#### **1.5. Hipotesis**

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat merumuskan formulasi hipotesis sebagai berikut:

1) Diduga bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.

2) Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.

- 3) Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020.

### **1.6.Sistematika Pelaporan**

Penulisan dalam skripsi ini akan meliputi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat konsep atau teori yang melandasi penelitian ini dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai data, sumber data, alat analisis yang digunakan dan batasan operasional dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang pemaparan serta analisis hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran terkait pembahasan penelitian.